

PENGARUH INFLASI DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI ACEH

Uswaturrahmi¹, Hamdani², Fakriah³

uswaturrahmi01@gmail.com¹, hamdani@pnl.ac.id², fakriah@pnl.ac.id³

Politeknik Negeri Lhokseumawe

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah yang dipengaruhi oleh faktor makroekonomi, seperti inflasi dan kebijakan fiskal pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan time series. Data yang digunakan merupakan data sekunder selama periode 2010–2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan instansi terkait. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan inflasi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Sebaliknya, belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti peningkatan belanja daerah dapat mendorong aktivitas ekonomi. Secara simultan, inflasi dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama memengaruhi kondisi ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengendalian inflasi dan pengelolaan belanja daerah yang efektif sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Inflasi, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of inflation and regional spending on economic growth in Aceh Province. Economic growth is an important indicator in assessing the success of regional development which is influenced by macroeconomic factors, such as inflation and local government fiscal policies. This study uses a quantitative method with a time series approach. The data used are secondary data for the period 2010 to 2024 obtained from the Central Statistics Agency and related agencies. The analysis method used was multiple linear regression with the help of SPSS software. The results of the study show that partially inflation has a negative and significant effect on economic growth. This shows that increased inflation can reduce economic growth in Aceh Province. On the other hand, regional spending has a positive and significant effect on economic growth, which means that an increase in regional spending is able to encourage economic activity. Simultaneously, inflation and regional spending have a significant effect on economic growth. This shows that these two variables together affect regional economic conditions. Therefore, inflation control and effective regional spending management are needed to support sustainable economic growth.

Keywords: Inflation, Regional Spending, Economic Growth.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah yang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini tidak hanya menggambarkan peningkatan aktivitas ekonomi lokal, tetapi juga berkaitan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks tersebut bisa dilihat ketika ekonomi daerah tumbuh dan berkembang, masyarakat bisa merasakan efeknya melalui peningkatan pendapatan, lapangan kerja yang terbuka luas dan

peningkatan aksesibilitas terhadap layanan publik. Mamuka et al. (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ada berbagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah, diantaranya pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, dan tingkat pendapatan perkapita.

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian global telah mengalami berbagai tantangan akibat ketidakpastian ekonomi yang terjadi di seluruh dunia, volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi, konflik geopolitik, serta penurunan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Situasi ini juga berdampak pada perekonomian Indonesia, termasuk Provinsi Aceh, yang masih menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dini, Tarigan, et al. (2021) menyebutkan bahwasanya sektor industri sering kali menjadi penggerak bagi kemajuan ekonomi dan mengindikasikan bahwa peningkatan sektor manufaktur memberikan sumbangsih yang positif dalam meningkatkan perekonomian, terutama saat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti perdagangan internasional.

Selain aspek-aspek tersebut, stabilitas ekonomi secara makro, khususnya inflasi, juga memainkan peran vital dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Inflasi menunjukkan adanya kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan yang secara langsung memengaruhi daya beli masyarakat, tingkat konsumsi, lingkungan investasi, dan kegiatan produksi. Inflasi yang tidak terkontrol mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang dan menambah ketidakstabilan ekonomi, sehingga mengakibatkan perlambatan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ada beberapa penelitian yang menganalisis hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dengan hasil yang bervariasi. Feronika Br Simanungkalit (2020) menemukan bahwa inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, Dwi et al. (2023) menemukan bahwa inflasi memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2013–2021, yang menunjukkan bahwa inflasi pada tingkat tertentu masih mampu mendorong aktivitas ekonomi. Namun, Putri et al. (2018) dikutip dalam Kartika (2023) menyatakan bahwa inflasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara Pratama dan Widyastuti (2022) justru menemukan bahwa inflasi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perbedaan dalam hasil-hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat kontekstual dan tergantung pada karakteristik ekonomi di masing-masing wilayah.

Dalam konteks daerah, kemampuan pemerintah daerah mengelola sumber pendapatan dan belanja publik juga menjadi faktor penting. Athaillah et al. (2013) menyatakan bahwa konsumsi pemerintah, investasi, dan angkatan kerja merupakan variabel penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh selama periode 1984–2011, yang mengalami fluktuasi kuat akibat kondisi ekonomi nasional dan daerah, termasuk dampak krisis moneter 1998. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor fiskal berperan besar dalam menentukan arah pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Tidak hanya itu, belanja pemerintah daerah memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian dengan salah satu komponen belanja daerah yaitu belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan publik dapat meningkatkan daya saing daerah dan menciptakan efek berganda terhadap aktivitas ekonomi. Yunus (2019) menegaskan bahwa belanja daerah yang tepat sasaran dapat meningkatkan produktivitas ekonomi, memperluas

lapangan kerja, serta menciptakan efek berganda bagi sektor strategis. Berdasarkan uraian tersebut belanja daerah penting dalam pertumbuhan ekonomi karena semakin tinggi belanja daerah, maka pertumbuhan ekonomi juga semakin baik karena dapat mendorong daerah untuk mengembangkan potensi fasilitas dan pelayanan publik serta meningkatkan aset jangka panjang.

Lebih lanjut, Provinsi Aceh merupakan Provinsi yang menunjukkan ciri-ciri ekonomi yang unik dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, hal ini ditunjukkan dari kontribusi pengeluaran pemerintah daerah sangat signifikan. Dengan demikian, efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah menjadi elemen penting bagi keberhasilan perkembangan ekonomi di Aceh. Ketidakakuratan dalam distribusi anggaran daerah berisiko menghalangi kemajuan ekonomi serta kesetaraan pembangunan antar wilayah.

Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan belanja daerah sangat menentukan bagaimana pembangunan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh tidak hanya dipengaruhi oleh faktor Global dan nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh variabel fiskal, variabel sosial-ekonomi, efektifitas penggunaan belanja publik serta dinamika perdagangan internasional.

Tabel 1. PDRB ACEH TAHUN 2010-2024

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (Y) Menurut Harga Konstan
2010	Rp 101.545.240.000,000
2011	Rp 104.874.210.000,000
2012	Rp 108.914.900.000,000
2013	Rp 111.755.830.000,000
2014	Rp 113.490.360.000,000
2015	Rp 112.665.530.000,000
2016	Rp 116.374.300.000,000
2017	Rp 121.240.980.000,000
2018	Rp 126.824.370.000,000
2019	Rp 132.069.620.000,000
2020	Rp 131.580.970.000,000
2021	Rp 135.274.040.000,000
2022	Rp 140.971.720.000,000
2023	Rp 146.932.420.000,000
2024	Rp 153.780.440.000,000

Sumber: BPS RI Tahun 2010 – 2024

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga Konstan tahun 2010 hingga 2024, terlihat bahwa perekonomian Aceh menunjukkan pola pertumbuhan yang positif dalam jangka panjang. Di tahun 2010, angka PDRB Aceh tercatat sekitar Rp 101,5 triliun dan secara bertahap meningkat hingga mencapai Rp 153,7 triliun pada tahun 2024. Data diatas menggambarkan bahwa kemampuan perekonomian Aceh dalam menghasilkan barang dan jasa secara riil mengalami kemajuan dari tahun ke tahun meskipun ada beberapa yang mengalami fluktuasi, terutama penurunan pada tahun 2015 dan 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, setelah tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Aceh memperlihatkan pemulihan yang signifikan, hal ini menandakan adanya peningkatan dalam aktivitas ekonomi serta revitalisasi sektor-sektor produktif pasca-pandemi. Kenaikan PDRB yang relatif stabil ini menunjukkan bahwa dari

perspektif makro, ekonomi Aceh tetap dalam jalur positif meskipun menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Aceh memperlihatkan arah yang baik, stabilitas ketahanan pertumbuhan ini masih mengalami beberapa tantangan besar khususnya yang berkaitan dengan perubahan inflasi dan efektivitas pengeluaran daerah. Fluktuasi inflasi mampu mengurangi kemampuan beli masyarakat serta menekan tingkat konsumsi, sedangkan pengeluaran daerah yang belum efisien berpotensi menghalangi proses penciptaan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, keterkaitan antara inflasi, belanja daerah, dan pertumbuhan ekonomi menjadi topik penting untuk dianalisis lebih mendalam supaya bisa menciptakan pemahaman terkait kondisi perekonomian Aceh.

Lebih lanjut, Penelitian Utami (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh dipengaruhi secara signifikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran, dengan kontribusi simultan mencapai 95,20% terhadap variasi pertumbuhan ekonomi Aceh. Hal ini menguatkan bahwa variabel sosial-ekonomi daerah memiliki dampak penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian Dini et al. (2021) menjelaskan bahwa sektor industri sering menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, namun variabel tenaga kerja tidak selalu memberikan pengaruh signifikan akibat distribusi produktivitas yang tidak merata.

Berdasarkan berbagai penelitian dan kondisi empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Aceh dipengaruhi oleh faktor-faktor global dan nasional, serta stabilitas makroekonomi seperti inflasi dan variabel fiskal daerah melalui belanja daerah. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis pengaruh inflasi dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh secara bersamaan masih terbatas. Padahal, kedua variabel ini adalah elemen penting dalam struktur perekonomian daerah dan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan Masyarakat.

Dengan demikian, diperlukan penelitian yang secara khusus menganalisis pengaruh inflasi dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh untuk mengatasi ketidaksesuaian antara teori dan bukti empiris yang ada, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan fiskal yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan asosiatif kausal, yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Inflasi (X1) dan belanja daerah (X2) sedangkan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi (Y). Penelitian ini dilakukan pada tingkat Provinsi Aceh dengan menggunakan data sekunder runtun waktu (time series) selama 15 tahun dari tahun 2010 sampai 2024.

Ruang lingkup penelitian adalah:

1. Inflasi tahunan Provinsi Aceh
2. Realisasi belanja daerah Provinsi Aceh
3. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Deskriptif

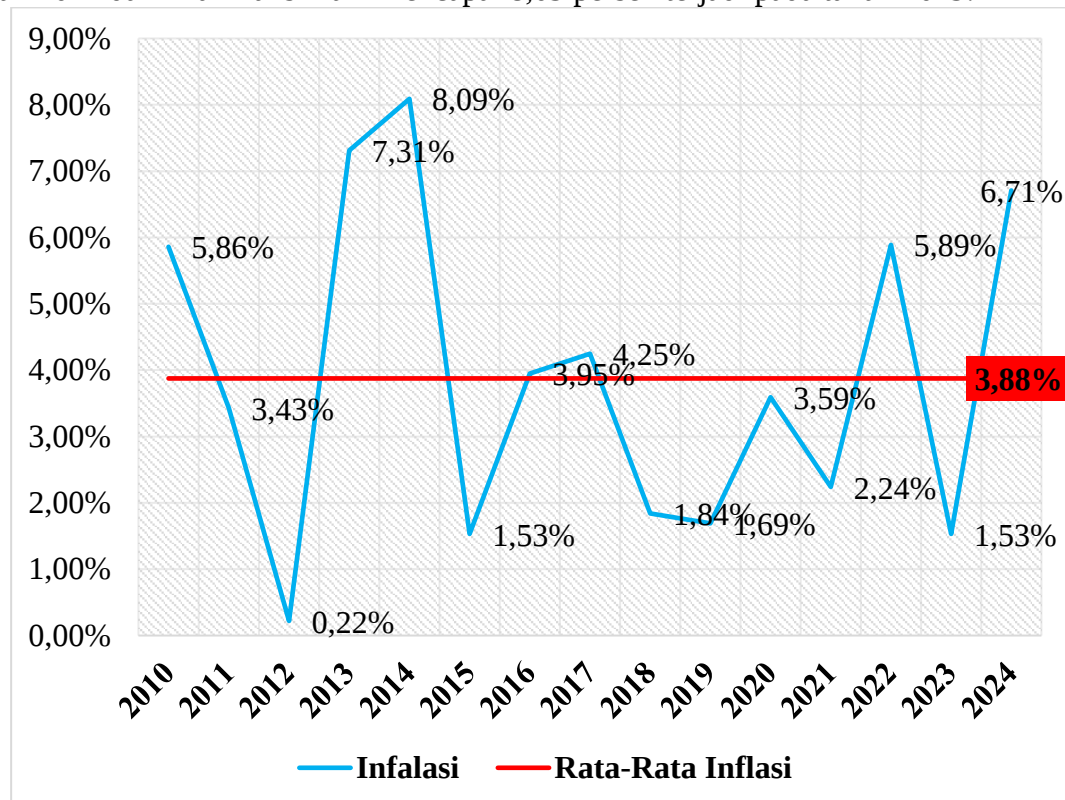
Untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik data dari setiap variabel yang diteliti, telah dilakukan analisis statistik deskriptif. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan mencakup nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, serta standar deviasi. Analisis ini diterapkan terhadap seluruh variabel yang terlibat dalam penelitian, yaitu Inflasi, Belanja Daerah serta Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh tahun 2010-2024. Rangkuman hasil analisis deskriptif tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Inflasi (X1)	15	0,22	8,09	3,88	2,42
Belanja Daerah (X2)	15	6,93	12,73	10,07	1,90
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	15	101545,24	153780,44	123886,33	15835,01
Valid N (listwise)	15				

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, diketahui bahwa rata-rata inflasi selama periode 2010–2024 sebesar 3,88 persen, dengan nilai minimum sebesar 0,22 persen terjadi pada tahun 2012 dan nilai maksimum mencapai 8,09 persen terjadi pada tahun 2019.

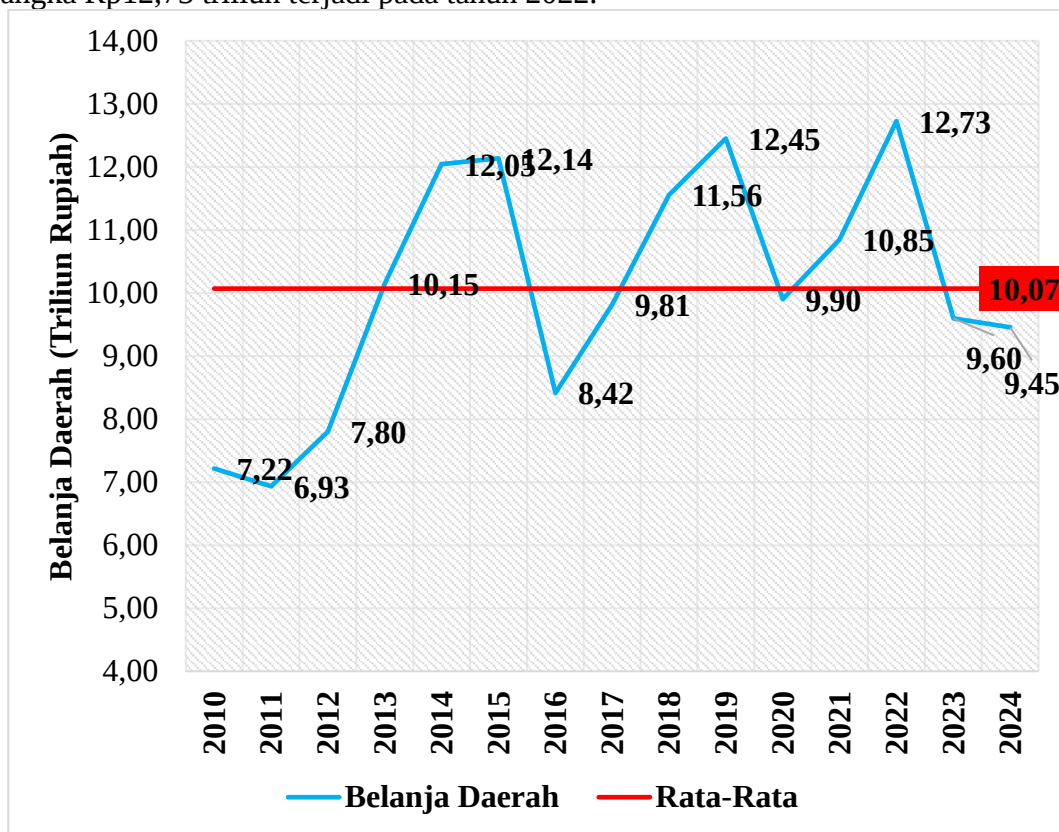


Gambar 1. Tingkat Inflasi di Provinsi Aceh

Berdasarkan perkembangan inflasi tahun 2010-2024, tingkat inflasi di Provinsi Aceh menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada tahun-tahun tertentu

dan menurun pada periode lainnya. Kenaikan inflasi yang relatif tajam, seperti pada tahun 2014, 2022, dan 2024. Penyesuaian harga bahan bakar minyak, tarif energi, serta kenaikan harga komoditas pangan strategis menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan Indeks Harga Konsumen. Selain itu, ketergantungan Aceh terhadap pasokan barang dari luar daerah menyebabkan gangguan distribusi dan kenaikan biaya logistik turut memperkuat tekanan inflasi, terutama ketika terjadi gejolak harga di tingkat nasional dan global. Kondisi ini sejalan dengan penjelasan Bank Indonesia bahwa inflasi daerah sangat sensitif terhadap harga pangan, energi, dan kelancaran distribusi. Sebaliknya, penurunan inflasi yang terjadi pada tahun-tahun tertentu, seperti 2012, 2015, 2018 - 2019, serta 2021, mencerminkan keberhasilan stabilisasi harga dan melemahnya tekanan permintaan agregat. Pada periode tersebut, harga energi relatif stabil, pasokan barang kebutuhan pokok terjaga, serta daya beli masyarakat cenderung melemah, terutama pada masa perlambatan ekonomi dan pandemi COVID-19. Menurunnya aktivitas konsumsi dan investasi menyebabkan tekanan harga menjadi lebih rendah, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

Selanjutnya, variabel Belanja Daerah memiliki nilai rata-rata sebesar Rp10,07 triliun, dengan nilai minimum Rp6,93 triliun terjadi tahun 2011 dan nilai maksimum mencapai angka Rp12,73 triliun terjadi pada tahun 2022.

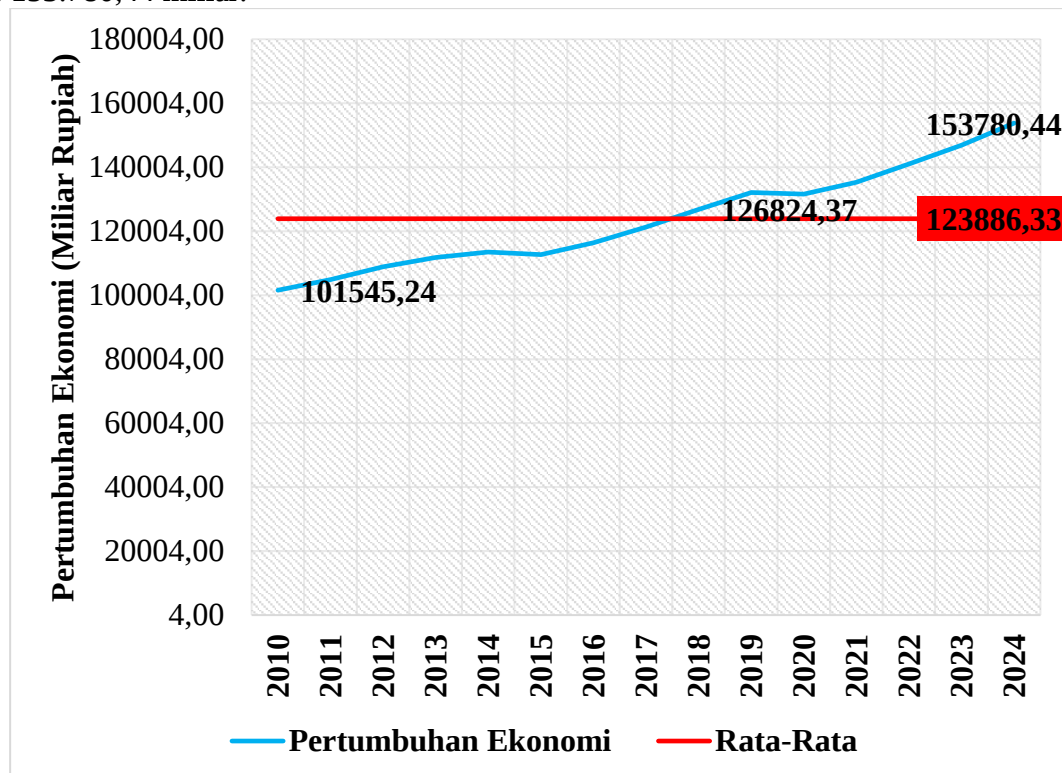


Gambar 2. Belanja Daerah di Provinsi Aceh

Berdasarkan data belanja daerah tahun 2010–2024, belanja daerah di Provinsi Aceh menunjukkan pola yang fluktuatif. Nilai belanja daerah terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar Rp6,93 triliun, sedangkan nilai tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar Rp12,73 triliun. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya dinamika kebijakan fiskal daerah yang dipengaruhi oleh kapasitas anggaran, prioritas pembangunan, serta kondisi ekonomi makro baik nasional maupun regional.

Peningkatan belanja daerah yang cukup tinggi pada periode 2013-2015 dan kembali meningkat pada 2018-2019 dan 2022 terutama didorong oleh meningkatnya alokasi belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta pembiayaan program strategis daerah. Peningkatan belanja daerah, khususnya belanja modal, berfungsi sebagai stimulus fiskal yang mampu mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat dan efek pengganda (multiplier effect). Kondisi ini menunjukkan bahwa ekspansi belanja pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah apabila dialokasikan secara produktif.

Sementara itu, variabel Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan nilai rata-rata Rp123.886,33 miliar, dengan nilai minimum Rp101.545,24 miliar dan nilai maksimum Rp. 153.780,44 miliar.



Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan tahun 2010–2024, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh menunjukkan tren meningkat dalam jangka panjang. Nilai PDRB harga konstan tercatat sebesar Rp101.545,24 miliar pada tahun 2010 dan terus meningkat hingga mencapai Rp153.780,44 miliar pada tahun 2024, dengan nilai rata-rata selama periode penelitian sebesar Rp123.886,33 miliar. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kapasitas produksi riil dan aktivitas ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Secara faktual, pertumbuhan ekonomi Aceh mengalami perlambatan pada tahun 2015 dan 2020 yang ditandai dengan penurunan nilai PDRB dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan pada tahun 2015 mencerminkan melemahnya aktivitas ekonomi akibat tekanan ekonomi nasional serta penyesuaian kebijakan fiskal daerah, sedangkan kontraksi pada tahun 2020 secara jelas dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menekan sektor konsumsi, investasi, dan perdagangan. Kondisi ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi yang menyatakan bahwa guncangan eksternal dan penurunan permintaan agregat dapat menurunkan output riil dalam jangka pendek.

Namun demikian, setelah tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Aceh kembali menunjukkan pemulihan yang konsisten, tercermin dari meningkatnya PDRB dari Rp135.274,04 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp153.780,44 miliar pada tahun 2024. Pemulihan ini mengindikasikan mulai pulihnya aktivitas ekonomi, meningkatnya belanja pemerintah, serta membaiknya daya beli masyarakat.

Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Pada sub bab ini, hipotesis konseptual yang diajukan sebelumnya akan diuji dan dibuktikan dengan menggunakan pengujian statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah diduga adanya pengaruh dari Inflasi dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh. Metode statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah regresi linier berganda dengan model sebagai berikut:

Keterangan:

Y_t = Pertumbuhan Ekonomi

= Konstanta

= Inflasi

= Belanja Daerah

t = Tahun pengamatan

= error term

Hasil pengujian selanjutnya disajikan dalam uraian berikut.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian asumsi normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah residual (e_i) dalam model memiliki distribusi yang normal atau tidak. Model yang baik seharusnya memiliki residual yang terdistribusi secara normal. Metode statistik yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov test dengan kriteria pengujian jika nilai Sig. yang dihasilkan lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa residual dalam model terdistribusi secara normal. Rangkuman hasil pengujian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,08801783
Most Extreme Differences	Absolute	0,165
	Positive	0,165
	Negative	-0,149
Test Statistic		0,165
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS

Berdasarkan hasil pengujian normalitas yang tersaji pada tabel di atas, dapat dilihat nilai Sig. yang diperoleh adalah sebesar $0,200 > 0,05$ (a) yang menunjukkan residual terdistribusi secara normal sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi.

Uji Multikolineritas

Multikolineritas mengacu pada adanya korelasi yang kuat antara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi sehingga mempengaruhi kestabilan estimasi koefisien regresi. Untuk mendeteksi masalah multikolineritas, digunakan dua indikator utama, yaitu nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolineritas dalam model regresi yang akan dibentuk. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Pengujian Asumsi Multikolineritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Inflasi (X1)	0,925	1,081
	Belanja Daerah (X2)	0,925	1,081

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya multikolineritas dalam model regresi yang akan dibentuk, dikarenakan seluruh variabel bebas yang dilibatkan kedalam model regresi memiliki nilai Tol yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji homogenitas varians residual dalam model regresi antar satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Model regresi yang baik diharapkan bebas dari gejala heteroskedastisitas. Salah satu metode yang umum digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat digunakan uji geljser yang dilakukan dengan cara meregresikan variabel bebas dengan nilai absolut residual (ARESID). Hasil pengujian di tampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas (Uji Geljser)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,015	2	0,007	2,473	0,126 ^b
	Residual	0,036	12	0,003		
	Total	0,051	14			

a. Dependent Variable: ARESID

b. Predictors: (Constant), Belanja Daerah (X2), Inflasi (X1)

Coefficients ^a		
Model	t	Sig.
1 (Constant)	-0,274	0,789
Inflasi (X1)	-2,028	0,065
Belanja Daerah (X2)	0,323	0,753

a. Dependent Variable: ARESID

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS

Berdasarkan hasil uji geljser yang tersaji pada tabel di atas, dapat dilihat nilai Sig. yang diperoleh adalah sebesar lebih besar dari 0,05 (a) yang menunjukkan varians residual

bersifat homogen (homoskedastisitas), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi ini didefinisikan sebagai korelasi antar observasi yang diukur berdasarkan deret waktu (time series) dalam model regresi atau dengan kata lain error (e_i) dari observasi tahun berjalan (t) dipengaruhi oleh error dari observasi tahun sebelumnya ($t-1$). Salah satu cara untuk mendeteksi masalah autokorelasi ini dapat digunakan Run Test. Hasil pengujian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5 Hasil Pengujian Asumsi Autokorelasi (Run Test)

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-0,00279
Cases < Test Value	7
Cases >= Test Value	8
Total Cases	15
Number of Runs	8
Z	0,000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1,000

a. Median

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi menggunakan run test, dapat dilihat nilai Sig. yang diperoleh adalah sebesar $1,000 > 0,05$ (a) yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam model yang akan dibentuk, sehingga model telah memenuhi asumsi untuk lolos autokorelasi. Dengan demikian, asumsi klasik autokorelasi telah terpenuhi, dan model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis selanjutnya.

Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian regresi linier berganda ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations
	B	Std. Error	Beta			Zero-order
1 (Constant)	3,364	4,031		0,835	0,420	
Inflasi (X1)	-0,024	0,011	-0,459	-2,192	0,024	-0,579
Belanja Daerah (X2)	0,282	0,134	0,440	2,102	0,029	0,565

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS

Persamaan regresi untuk menjelaskan pengaruh dari inflasi dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

$$Y = 3,364 - 0,024 \text{ INF} + 0,282 \text{ BD}$$

Secara statistik, nilai-nilai dalam persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 3,364 menunjukkan nilai prediksi untuk rata-rata pertumbuhan ekonomi jika inflasi dan belanja daerah secara simultan pengaruhnya adalah 0 (nol).

- b) Koefisien regresi untuk inflasi adalah sebesar -0,024 dan bernilai negatif yang artinya setiap terjadi peningkatan inflasi 1 satuan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,024 satuan.
- c) Koefisien regresi untuk belanja daerah adalah sebesar 0,282 dan bernilai positif yang artinya setiap peningkatan belanja daerah sebesar 1 satuan diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,282 satuan.

Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Nilai thitung yang digunakan sebagai nilai kritis dalam pengujian hipotesis parsial adalah sebesar 1,782 yang diperoleh dari tabel distribusi t dengan nilai df ($n - (k + 1) = 12$) pada taraf signifikansi (α) sebesar 5% untuk uji satu pihak (one-tailed test). Hipotesis penelitian yang diuji adalah sebagai berikut:

Hipotesis I

H1: Inflasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh

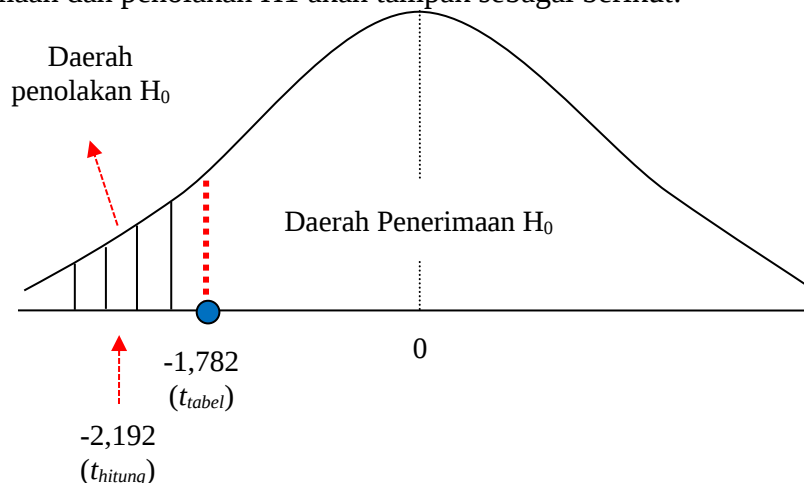
Rekapitulasi hasil pengujian hipotesis parsial ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 7 Hasil Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Model	thitung	ttabel	α	Sig.t	Keputusan	Kesimpulan
$X_1 \rightarrow Y$	-2,192	-1,782	0,05	0,024	H1 diterima	Signifikan

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS

Dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai thitung yang diperoleh adalah sebesar -2,192 lebih kecil dari -1,782 (ttabel) dengan nilai signifikansi 0,024. Dikarenakan nilai -thitung < -ttabel maka dengan taraf kepercayaan sebesar 95% ($\alpha = 5\%$) dapat diputuskan untuk menerima H1. Jika dipetakan kedalam gambar kurva pengujian hipotesis parsial, maka daerah penerimaan dan penolakan H1 akan tampak sebagai berikut:



Gambar 4. Kurva Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh hasil bahwa Inflasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh selama periode 2010-2024. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat inflasi cenderung menurunkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan penurunan inflasi berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi..

Hipotesis II

H2: Belanja Daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh

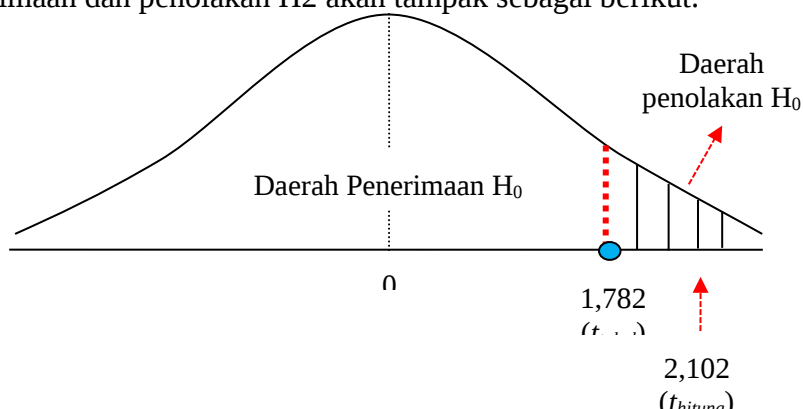
Rekapitulasi hasil pengujian hipotesis parsial ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 8 Hasil Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Model	t _{hitung}	t _{tabel}	α	Sig.t	Keputusan	Kesimpulan
X ₂ → Y	2,102	1,782	0,05	0,029	H2 diterima	Signifikan

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS

Dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 2,102 lebih besar dari 1,782 (t_{tabel}) dengan nilai signifikansi 0,029. Dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka dengan taraf kepercayaan sebesar 95% ($\alpha = 5\%$) dapat diputuskan untuk menerima H2. Jika dipetakan kedalam gambar kurva pengujian hipotesis parsial, maka daerah penerimaan dan penolakan H2 akan tampak sebagai berikut:



Gambar 5 Kurva Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh hasil bahwa Belanja Daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh selama periode 2010-2024. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebaliknya penurunan belanja daerah dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis simultan ini adalah uji F. Nilai F_{tabel} yang digunakan sebagai nilai kritis dalam uji hipotesis simultan ini adalah sebesar 3,885 yang diperoleh dari lampiran tabel distribusi F dengan $\alpha = 5\%$, $df_1 = 2$ dan $df_2 (n - (k-1)) = 12$. Kriteria pengambilan keputusan :

- 1) Tolak H_0 dan Terima H_a jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$
- 2) Terima H_0 dan Tolak H_a jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$

Rumusan hipotesis simultan yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H3: Inflasi dan Belanja Daerah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh selama periode 2010-2024.

Taraf signifikansi (α) yang digunakan sebesar 0,05 atau 5%

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Hasil Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	0,115	2	0,057	6,351	0,013 ^b
Residual	0,108	12	0,009		
Total	0,223	14			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

b. Predictors: (Constant), Belanja Daerah (X2), Inflasi (X1)

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS

Dari tabel di atas, diperoleh informasi bahwa nilai Fhitung yang diperoleh adalah sebesar 6,351 lebih besar dari 3,885 (Ftabel) dengan nilai Sig. F sebesar $0,013 < 0,05$ (a) maka pada taraf kepercayaan 95% dapat diputuskan untuk menerima H3 yang berarti bahwa Inflasi dan Belanja Daerah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh selama periode 2010-2024.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) adalah nilai yang menunjukkan sejauh mana variabel bebas mampu menjelaskan variabilitas dari variabel terikat. Nilai R^2 memiliki skala antara 0% hingga 100%, di mana semakin tinggi nilai R^2 , semakin baik model tersebut dalam menjelaskan variabel terikatnya. Dengan kata lain, semakin tinggi koefisien determinasi, semakin besar proporsi variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam model. Hasil pengujian ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 10 Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,717 ^a	0,514	0,433	0,09507

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah (X2), Inflasi (X1)

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS

Dari tabel di atas, diperoleh informasi bahwa nilai R^2 yang diperoleh adalah sebesar 0,514 yang menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya, sehingga koefisien determinasi dapat dihitung:

$$Kd = 0,514 \times 100\%$$

$$= 51,4\%$$

Hasil pengujian menunjukkan koefisien determinasi sebesar 51,4% yang berarti Inflasi dan Belanja Daerah memberikan kontribusi pengaruh sebesar 51,4% terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh tahun 2010-2024, sedangkan sebanyak $(1-R^2)$ 48,6% sisanya merupakan besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti.

Untuk mengetahui kontribusi pengaruh secara parsial, dapat diketahui dari hasil perkalian antara nilai beta yang merupakan koefisien regresi terstandarkan (standardized coefficients) dengan zero-order (r_{yx}) yang merupakan nilai korelasi parsial. Hasil perhitungan koefisien determinasi parsial disajikan pada tabel berikut:

Tabel 11 Koefisien Determinasi Parsial

Koefisien Determinasi Parsial			
Model	Standardized Coefficients	Correlations	Partial Coefficient of Determination
	Beta	Zero-order	
Inflasi (X1)	-0,459	-0,579	0,266
Belanja Daerah (X2)	0,440	0,565	0,249
	Total Effect		0,514

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS dan Ms. Excel

Tabel di atas memberikan informasi mengenai besar kontribusi pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Interpretasi untuk tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Inflasi secara parsial memberikan kontribusi pengaruh sebesar 26,6% Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh selama periode 2010-2024.

Belanja Daerah secara parsial memberikan kontribusi pengaruh sebesar 24,9% Pertumbuhan Ekonomi Provinsi selama periode 2010-2024.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh selama periode 2010-2024

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parsial, diperoleh nilai thitung sebesar -2,192 yang lebih kecil dari pada ttabel sebesar -1,782. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,024 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima yang menunjukkan bahwa Inflasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh selama periode 2010-2024.

Hasil pengujian tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat inflasi cenderung diikuti oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi yang rendah dan terkendali berpotensi mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Secara ekonomi makro, inflasi yang tinggi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat karena kenaikan harga barang dan jasa tidak selalu diikuti oleh peningkatan pendapatan nominal. Penurunan daya beli ini berdampak langsung pada melemahnya konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen utama pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga aktivitas ekonomi melambat dan pertumbuhan ekonomi mengalami tekanan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Keynesian yang menyatakan bahwa inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat yang berdampak pada melemahnya konsumsi dan investasi. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan agregat menurun yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Selain berdampak pada konsumsi, inflasi yang tidak stabil juga menciptakan ketidakpastian ekonomi yang memengaruhi keputusan investasi. Pelaku usaha cenderung menunda ekspansi dan penanaman modal akibat meningkatnya risiko usaha serta ketidakpastian biaya produksi. Kondisi tersebut menyebabkan akumulasi modal terhambat dan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan teori ekonomi makro Keynesian dan Neo-Keynesian yang menyatakan bahwa inflasi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penurunan pendapatan riil, konsumsi, dan investasi (Mankiw, 2019; Blanchard, 2021). Oleh karena itu, stabilitas harga dipandang sebagai prasyarat penting bagi terciptanya iklim ekonomi yang kondusif serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini didukung oleh penelitian Siregar dan Wardhana (2017) bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang mengindikasikan bahwa kenaikan inflasi cenderung menekan aktivitas ekonomi riil. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Yulia Dwi dan Johni Paul Karolus Pasibuan (2023) yang menemukan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2013 hingga 2021. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Amir Salim dan Anggun Purnamasari (2021) yang menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, inflasi bisa menunjukkan adanya kenaikan permintaan secara keseluruhan yang mendorong produksi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang berada pada tingkat moderat biasanya tidak mengganggu kestabilan ekonomi, namun bisa menjadi tanda bahwa aktivitas ekonomi sedang berkembang. Jadi,

hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu negatif, tetapi bergantung pada tingkat inflasi dan kondisi perekonomian di sekitarnya. Penelitian Putri (2019) menyimpulkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sumatra, yang terutama disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat dan investasi daerah. Hasil yang konsisten juga ditunjukkan oleh Rahman dan Hidayat (2020) yang meneliti hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak terkendali berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Temuan serupa diperoleh oleh Nasution (2021) yang menyimpulkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi di Indonesia, sehingga memperkuat pandangan bahwa stabilitas harga merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda. Ayyubi dan Anggraeni (2018) menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, khususnya ketika inflasi berada pada tingkat yang rendah dan relatif stabil. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada tingkat inflasi, struktur perekonomian, serta kondisi makroekonomi yang berlaku di masing-masing daerah.

Ketergantungan perekonomian Provinsi Aceh yang relatif tinggi pada konsumsi rumah tangga dan sektor primer menjadikan inflasi sebagai faktor yang sangat sensitif terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika inflasi meningkat, biaya hidup masyarakat naik dan konsumsi riil menurun, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah mengalami perlambatan. Temuan empiris penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh selama periode 2010-2024

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parsial, diperoleh nilai thitung sebesar 2,102 yang lebih besar daripada ttabel sebesar 1,782. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,029 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima yang menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh selama periode 2010-2024.

Hasil pengujian tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan belanja daerah cenderung mendorong peningkatan aktivitas ekonomi regional. Secara konseptual, belanja daerah merupakan instrumen fiskal utama pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peningkatan belanja pada sektor-sektor tersebut mampu menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian daerah melalui peningkatan permintaan agregat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pada perspektif ekonomi makro, belanja pemerintah daerah berperan sebagai komponen penting dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ketika belanja daerah dialokasikan secara produktif, khususnya pada belanja modal dan belanja pembangunan, maka kapasitas produksi daerah akan meningkat. Peningkatan kapasitas produksi ini mendorong pertumbuhan output regional secara berkelanjutan dan

memperkuat struktur perekonomian daerah. Sebaliknya, belanja daerah yang tidak efektif atau bersifat konsumtif cenderung memberikan dampak yang terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Sumarni (2024), yang menunjukkan bahwa belanja daerah berdampak positif meski tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan hasil tersebut mungkin karena beberapa hal, misalnya perbedaan keadaan wilayah, cara mengelola uang yang efektif, dan fokus penggunaan anggaran daerah. Selain itu, dalam beberapa kasus, belanja daerah membutuhkan waktu sebelum dapat memberikan dampak pada perekonomian. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah yang baik dan difokuskan pada sektor produktif dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun temuan dari penelitian ini sejalan dengan teori Keynesian yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat, terutama pada kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya optimal (Macroeconomics). Belanja pemerintah menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi karena mampu menstimulasi sektor swasta dan rumah tangga secara simultan. Selain itu, teori pertumbuhan ekonomi endogen juga menekankan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Economic Development).

Temuan empiris dalam penelitian ini juga diperkuat oleh beberapa penelitian terdahulu. Sodik dan Nuryadin (2005) menemukan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Penelitian tersebut menegaskan bahwa daerah dengan alokasi belanja pembangunan yang lebih besar cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Selanjutnya, Kuncoro (2012) menyatakan bahwa belanja daerah, khususnya belanja modal, berperan penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah melalui perbaikan infrastruktur dan peningkatan iklim investasi. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Ramayandi (2017) yang menyimpulkan bahwa belanja pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia, terutama pada daerah yang mampu mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Penelitian Sari dan Prasetyo (2018) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa belanja daerah yang diarahkan pada sektor produktif mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan konektivitas wilayah.

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi tidak selalu signifikan apabila alokasi anggaran didominasi oleh belanja rutin atau belanja pegawai. Wibowo (2019) menemukan bahwa belanja daerah yang kurang produktif cenderung tidak memberikan dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan komposisi belanja daerah menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan fiskal daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada Provinsi Aceh, peran belanja daerah menjadi sangat strategis mengingat karakteristik perekonomian daerah yang masih didominasi oleh sektor primer dan ketergantungan yang relatif tinggi terhadap intervensi pemerintah. Alokasi belanja daerah yang tepat sasaran, khususnya pada pembangunan infrastruktur, penguatan sektor UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, temuan empiris

penelitian ini menegaskan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh selama periode 2010-2024.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Inflasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh selama periode 2010-2024. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat inflasi, maka pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami penurunan. Kondisi tersebut terjadi karena inflasi yang tinggi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang tidak selalu diikuti oleh peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga daya beli masyarakat akan mengalami penurunan. Menurunnya daya beli tersebut berdampak pada melemahnya konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu komponen utama pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, inflasi yang tinggi juga dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi serta mengurangi minat investasi. Mengingat perekonomian Provinsi Aceh masih relatif bergantung pada konsumsi rumah tangga dan sektor primer, maka inflasi yang tinggi dan tidak stabil cenderung menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Belanja Daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh selama periode 2010-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena belanja daerah merupakan instrumen fiskal yang digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peningkatan belanja pada sektor-sektor produktif tersebut dapat menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) melalui peningkatan permintaan agregat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan produktivitas daerah. Oleh karena itu, pengelolaan belanja daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh secara berkelanjutan.
3. Inflasi dan Belanja Daerah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh selama periode 2010-2024 dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 51,4% sedangkan sebanyak 48,6% sisanya merupakan kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tidak hanya dipengaruhi oleh stabilitas harga, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Provinsi Aceh tidak hanya bertugas untuk menjaga stabilitas inflasi, tetapi juga perlu memperhatikan penyebab utama inflasi lokal, khususnya dalam kelompok bahan makanan yang sering berubah-ubah. Pengendalian inflasi harus dilakukan dengan memperkuat distribusi barang, menjaga kestabilan pasokan serta menjalin koordinasi yang intens dengan pemerintah pusat.
2. Meskipun pengeluaran daerah terbukti memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah harus memastikan bahwa pengeluarannya

tidak terlalu banyak untuk biaya operasional. Dibutuhkan perubahan kebijakan anggaran dengan memperbesar bagian pengeluaran yang secara langsung memengaruhi peningkatan hasil ekonomi Aceh, seperti infrastruktur, peningkatan UMKM, serta pengembangan sektor unggulan di daerah.

3. Peningkatan pengeluaran daerah tidak bisa otomatis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang baik jika tidak disertai dengan pengelolaan yang berkualitas. Maka dari itu, pemerintah daerah harus memperkuat perencanaan, pengawasan, dan penilaian program agar pengeluaran yang dilakukan lebih efisien, efektif, dan menghasilkan dampak positif yang maksimal untuk pertumbuhan ekonomi daerah
4. Diperlukan kolaborasi yang lebih efektif antara kebijakan pengeluaran daerah dan usaha untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah daerah harus bisa merancang kebijakan fiskal yang adaptif terhadap kondisi inflasi, dengan mengarahkan belanja untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan daya beli masyarakat. Tanpa adanya sinergi akan memberikan dampak positif belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga dapat tereduksi oleh tekanan inflasi.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengembangkan model penelitian dengan memasukkan variabel tambahan seperti investasi, sumber daya manusia (SDM), dan indeks pembangunan manusia (IPM), serta menggunakan pendekatan data panel untuk menangkap perbedaan antar Kabupaten/Kota di Aceh untuk melihat pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh inflasi dan belanja daerah tetapi oleh faktor struktural lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, B. P. S. P. (2024). Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh.
- Aliqa Riyana Putri, Alifa Rahma, Ayyie Ahmad Haidar, & Muhammad Badja Sudjatimeras. (2024). Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *JEMBA: Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 2(3), 34–46.
- Athailah, H., & Masbar. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi (3), 1–13.
- Bank Indonesia. (2023). Inflasi. <https://www.bi.go.id>.
- Dini, S., Tarigan, E. A. B., & Siregar, M. N. A. (2021). Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. *PARETO : Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 65–80.
- Dwi, Y., Johni, K., & Karolus, P. (2023). Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2013-2021. 2, 131–137.
- Fahrudin. (2024). Faktor-Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi. 2, 1375–1384.
- Feronika Br Simanungkalit, E. (2020). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Journal of Management*, 13(3), 327–340.
- Ghozali, I. (2011). Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *Essentials of Economics* (Issue March).
- Hutahaean, P. (2019). Belanja Negara dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Analisis Kointegrasi dan Kausalitas. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 3(2), 103–115. <https://doi.org/10.31685/kek.v3i2.411>.
- Leslie, H., & Spits, H. (2018). Implementasi Supervised Emerging Patterns Pada Sebuah Attribut : (Studi Kasus Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Perubahan Pada Pemerintah Dki Jakarta). 1–8.
- Mamuka, K. K., Pingkan, I., Rorong, F., Sumual, J. I., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. In *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* (Vol. 19, Issue 03).
- Manik, M. (2022). Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. 23(2), 13–20.

- Mardiasmo. (2018). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Maulida1, Y., Hamid2, A., & Faisal Umardani Hasibuan. (2022). Pengaruh Investasi, Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.
- Nasution, A. (2021). Pengaruh inflasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Skripsi. Universitas Negeri Medan.
- Nopirin. (2016). Ekonomi Moneter (BPFE).
- Nova, N. (2022). Analisis Hubungan Kebijakan Moneter Dengan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika*, 14(1), 46–51.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2020). Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. In *Permendagri No 77 Tahun 2020*.
- Prastiwi, I. W., Amalia, D., & Khairan, S. (2025). Teori-Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 297–305. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059>.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatis Kuantitatif R&D. Albeta.
- Putri, R. A. (2019). Pengaruh inflasi, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatra. Skripsi. Universitas Andalas.
- Putri, S. A. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Belanja Daerah. 11(2).
- Rahman, Z., & Sumarni. (2024). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. 7(1), 1183–1193.
- Renggo, Y. R. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi.
- Salim, A. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. 7, 17–28.
- Siregar, H., & Wardhana, A. (2017). Dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 19(3), 345–362.
- Statistik, B. P. (2023). Indeks Harga Konsumen dan Inflasi. <https://www.bps.go.id>
- sujatmiko, alfiorence, Setiawan, F., Alfina, N., Elyansyah, N., Rizky, P., & Asitah, N. (2025). Artikel Nusantara Entrepreneurship and Management Review Hubungan antara Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Kajian Literatur Sistematis. *Nemr*, 3(1), 39–45.
- Sukirno, S. (2018). Teori Pengantar Makroekonomi.
- Syafrida Afni Syahir. (2022). Metodologi Penelitian.
- Syahputra, R. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. 1(2), 183–191.
- Tri Nugraha, H., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Pandangan Model Dua-Sektor Lewis dan Model Solow terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
- Utami, F. P. (2020). Pengaruh Pembangunan Indeks Manusia (IPM), Kemiskinan, Pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4(2), 101–113:104
- Wianti, W., & Nurgaheni, N. E. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 2(3), 169–176.
- Widia Wardani, suriana dkk. (2024). Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akselerasi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (pp. 1–23).
- Widiarsih, D., & Romanda, R. (2020). Using the Error Corection Model (ECM) Approach. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 10(1), 2015–2019.
- Yunus, S. (2019). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*.